

## **ABSTRAK**

### **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 (Studi di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**IraTya Anggie**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam menjaga profesionalisme dan integritas birokrasi, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). ASN yang seharusnya tidak berpihak dan bebas dari intervensi politik sering kali dihadapkan pada tekanan politik yang dapat mempengaruhi netralitas mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada implementasi prinsip netralitas berdasarkan teori birokrasi Max Weber dan Teori Hegel yang mencakup indikator struktur hierarkis, impersonalitas, kepatuhan pada aturan, rekrutmen berdasarkan kualifikasi, gaji tetap dan keamanan pekerjaan, sistem promosi berdasarkan prestasi serta netralitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ASN, pejabat pemerintah, dan pihak terkait seperti Bawaslu dan KPU, serta melalui observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait netralitas ASN telah diterapkan, masih ditemukan celah yang memungkinkan adanya intervensi politik dalam beberapa aspek, terutama dalam promosi jabatan dan tekanan politik terhadap ASN di level tertentu. Namun, dalam aspek rekrutmen berbasis kualifikasi dan penerapan gaji tetap serta keamanan kerja, prinsip netralitas relatif terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung telah mengalami perbaikan dibandingkan Pilkada sebelumnya, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi dalam promosi jabatan, serta sosialisasi yang lebih intensif terkait regulasi netralitas ASN untuk memastikan bahwa birokrasi tetap profesional dan independen dari kepentingan politik.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pilkada 2024, Birokrasi, Intervensi Politik, Kota Bandar Lampung.

## **ABSTRACT**

### ***The Neutrality of Civil Servants in the 2024 Regional Election (A Study in Bandar Lampung City)***

**By**

**IraTya Anggie**

*The neutrality of Civil Servants (ASN) is a fundamental principle in maintaining the professionalism and integrity of bureaucracy, especially in the context of regional elections (Pilkada). ASN, who should remain impartial and free from political intervention, often face political pressure that can influence their neutrality. This study aims to analyze the neutrality of ASN in the 2024 Pilkada in Bandar Lampung City, focusing on the implementation of neutrality principles based on Max Weber's bureaucratic theory and Hegel Theory. These principles include hierarchical structure, separation of politics and administration, adherence to regulations, impartiality, recruitment based on qualifications, fixed salary and job security, a merit-based promotion system and Neutrality. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with ASN, government officials, and relevant institutions such as Bawaslu and KPU, as well as through observations and document analysis. The findings indicate that although regulations regarding ASN neutrality have been enforced, there are still gaps that allow political intervention in certain aspects, particularly in job promotions and political pressure on ASN at specific levels. However, the principles of neutrality are relatively maintained in aspects such as qualification-based recruitment and the implementation of fixed salaries and job security. The study concludes that ASN neutrality in the 2024 Pilkada in Bandar Lampung City has improved compared to previous elections but still faces challenges in field implementation. Therefore, stronger supervision, increased transparency in job promotions, and more intensive socialization of ASN neutrality regulations are necessary to ensure that bureaucracy remains professional and independent from political interests.*

**Keywords:** ASN Neutrality, 2024 Pilkada, Bureaucracy, Political Intervention, Bandar Lampung City.